

BAB III **ISU-ISU STRATEGIS** **BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
- b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum optimal
- c. Keterbatasan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian
- d. Fluktuasi harga yang tidak stabil dan disparitas harga yang cukup tinggi di tingkat petani dan konsumen
- e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
- f. Status dan luas kepemilikan lahan yang terbatas
- g. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
- h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian
- i. Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktifitas ternak masih rendah.
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan (dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medic dan para medic peternakan).
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan.

2. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perikanan
- c. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak

3. Permasalahan Pembangunan Bidang Kehutanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang kehutanan, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan hutan kota
- b. Masih terdapatnya lahan kritis yang perlu segera ditangani
- c. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Pontianak :

*“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik,
Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”*

Misi Kota Pontianak:

Sesuai dengan visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2015 – 2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 4 : Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni. Pada misi ke empat ini peran dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah mendukung Kota Pontianak menjadi kota yang berwawasan lingkungan melalui penghijauan lingkungan dan mengurangi luas lahan kritis yang ada di Kota Pontianak.
2. Pernyataan misi ke 5 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing. Pada misi ke lima ini terlihat jelas peran dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah berpartisipasi aktif dalam menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan produksi daging, meningkatkan produksi ikan baik itu ikan air tawar hasil budidaya maupun ikan laut dari penangkapan di perairan selain itu peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berupaya secara konkrit dalam meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, meningkatkan PDRB sektor pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kota Pontianak.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Visi Kementerian Pertanian Republik Indonesia

“Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.

4. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
2. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
 3. Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah

"Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Modern, Berbudaya Industri, Berbasis Pedesaan dan Berdaya Saing"

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi manajemen pembangunan pertanian tanaman pangan dan Hortikultura yang efektif
- b. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan
- c. Meningkatkan mutu, daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dari hasil telaahan tersebut Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian selama lima tahun kedepan yaitu dengan berusaha secara optimal meningkatkan kesejahteraan petani dan atau kelompok

pengolah hasil pertanian dengan melaksanakan fungsi manajemen pembangunan pertanian yang tepat, berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dengan menyediakan prasarana dan sarana, menumbuhkan kembangkan kelembagaan usaha petani, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, mengembangkan sistem agroindustri, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan menjaga serta mengawasi mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

4. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat adalah

"Mewujudkan Ketersediaan Produk Peternakan yang Cukup dan Berkualitas Melalui Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tangguh"

Terdapat 2 (dua) Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatkan produksi hasil peternakan
- b. Meningkatkan kesehatan hewan dan keamanan lingkungan budidaya serta melindungi masyarakat terhadap penyakit hewan menular strategis.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang peternakan selama lima tahun kedepan yaitu dengan berusaha secara optimal meningkatkan kesejahteraan peternak dan atau kelompok pengolah hasil peternakan dengan melaksanakan fungsi manajemen pembangunan peternakan yang tepat, berupaya meningkatkan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat serta berdaya saing dengan menyediakan kawasan peternakan yang terpadu, menyediakan prasarana dan sarana, turut serta menumbuhkan kembangkan kelembagaan usaha peternak, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, menjaga kesehatan hewan dan lingkungan budidaya serta melindungi masyarakat dari penyakit hewan menular strategis secara berkelanjutan.

5. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

"Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat yang Berdaya Saing
Berbudaya dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat"

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dinas yang profesional, beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal
- b. Mewujudkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengendalian dan monitoring pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin efektif, efisien dan akuntabel
- c. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan PPK secara terpadu dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Semakin Maju, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
- e. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
- f. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
- g. Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara yang didukung dengan keberadaan Kawasan Sentra Agribisnis. Kawasan Sentra Agribisnis adalah kawasan yang direncanakan untuk mendukung dan memperkuat pengembangan potensi lokal Kota Pontianak. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Selain itu pengembangan kawasan sentra agribisnis juga diharapkan akan saling melengkapi pengembangan pariwisata Khatulistiwa Kota

Pontianak selain mendorong percepatan hasil produksi dan pengembangan wilayah. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan sentra agribisnis seluas ± 800 Ha (7,42 %). Sampai dengan saat ini penggunaan lahan pada Kawasan Sentra Agribisnis mencapai 254,5 Ha (31.67%) dengan rincian pemanfaatan untuk kawasan Lidah Buaya, Pepaya dan Jagung 198,5 Ha, Kawasan Tanaman Kacang-Kacangan, dan Sayuran Dataran Rendah 42 Ha, Kawasan Peternakan 5 Ha, Kawasan RPH dan Puslitbang Terpadu 6 Ha, Kawasan Sub Terminal Agribisnis 2 Ha, Kawasan Pendidikan dan Kesehatan seluas 1 Ha, berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Kegiatan peternakan lainnya yang cukup berkembang di beberapa wilayah di Kalimantan Barat adalah budidaya walet. Maka dari itu dalam upaya pengelolaan perkembangan budidaya walet sebagai rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami menjadi salah satu bentuk penggunaan lahan Kota Pontianak. Lokasi budidaya walet di Kota Pontianak diarahkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara (sekitar Jalan 28 Oktober dan jalan Kebangkitan Nasional). Kedepannya dalam hal peredaran sarang burung walet akan dilengkapi dengan dokumen legalitas berupa surat angkutan sarang burung walet. Arahan dari Kepala Daerah Kota Pontianak dan komitmen Kepala SKPD agar semua aktivitas peternakan di Kota Pontianak akan dilaksanakan pada kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Pontianak Utara. Program dan kegiatan bidang peternakan sebagai bentuk pelayanan SKPD dilakukan pada kawasan tersebut antara lain telah membangun kandang komunal bagi peternak sapi sehingga aktivitas peternakan yang ada di wilayah Kota Pontianak dilakukan dalam suatu kawasan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan potensial. Kawasan Minapolitan yang ditetapkan disepanjang Sungai Kapuas dengan dua buah inti yaitu kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan di Jalan Kom Yos Sudarso di belakang eks kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat sebagai *core* atau inti kawasan perikanan tangkap dan Balai Benih Ikan dengan luas $\pm 1,4$ Ha di Jalan Rais Rahman Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur sebagai *core* atau inti kawasan perikanan budidaya, selain itu dalam mendukung pengembangan ikan hias yang memiliki penggemar cukup banyak di Kota Pontianak, telah dibangun Pusat Ikan Hias (Raiser) seluas ± 2 Hektar tepatnya di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak, jenis ikan yang tersedia yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Keberadaan kawasan minapolitan, program dan kegiatan yang menjadi layanan SKPD di diharapkan mampu membangkitkan aktivitas di sektor perikanan di Kota Pontianak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu :

1. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
3. Akses pemasaran hasil pertanian dan permodalan masih terbatas
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
5. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan
6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peternakan
7. Tingginya tuntutan masyarakat akan bahan pangan yang ASUH yang masih belum diimbangi dengan keterjaminan akan bahan pangan yang ASUH.
8. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM perikanan

10. Tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak yang belum diimbangi dengan kecukupan akan produksi ikan di Kota Pontianak.
11. Masih luasnya lahan kritis
12. Belum tertibnya peredaran hasil hutan
13. Belum adanya PAD dari sektor kehutanan

a. Analisa Lingkungan Strategis

1) Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, faktor – faktor peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
2. Pertumbuhan jumlah penduduk
3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan Kehutanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.

5. Masuknya produk impor yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap

2) Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki kan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak sebagai berikut:

a) Kekuatan

1. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
3. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
4. Ketersediaan Produk Hukum Penunjang Pelayanan SKPD.

b) Kelemahan

1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap masyarakat yang dilayani.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal.
3. Minimnya penguasaan teknologi di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan (budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran).
4. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan.
5. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kurang memadai.
7. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.

3) Analisa SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini.



Tabel. III.1.
Matriks Analisa SWOT

<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana 2. Kualitas Aparatur (tingkat pendidikan dan pengalaman) kerja cukup memadai 3. Adanya Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPK 4. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD 	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani 2. Keterbatasan sarana dan prasarana 3. Minimnya penguasaan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (pra dan pasca panen). 4. Belum tercapainya target PAD SKPD 5. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang 6. SIM (Sistem Informasi Manajemen) kurang memadai 7. Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat
	<p>PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH 2. Pertumbuhan jumlah penduduk 3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha 4. Segmen Pasar masih terbuka luas 5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber 6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain 7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan Kehutanan 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya ketersediaan dana dapat membuka peluang inovasi teknologi baru 2. Memanfaatkan Kualitas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan yang sehat dan asuh, membuka peluang pasar dan kemitraan dengan berbagai pihak (baik swasta maupun instansi pemerintah horizontal dan vertikal) yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan 3. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD membantu menentukan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan <p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah penduduk dapat mengatasi minimnya penguasaan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program-program kegiatan yang padat karya 2. Terbukanya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mengatasi rendahnya rasio ketersediaan aparatur dalam melayani masyarakat dan distribusi pegawai yang kurang seimbang pada beberapa UPT 3. Kebijakan Pemerintah yang sesuai dan dapat mendorong pencapaian target PAD dan peningkatan efektivitas 4. Inovasi teknologi baru yang dapat menjamin akurasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) inventarisasi sarana dan prasarana

TANTANGAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian 2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah 3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk akses ke perbankan 4. Lemahnya modal usaha petani/pelaku usaha 5. Masuknya produk impor yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing 6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu 7. Harga sapirodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen 8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu serta membantu petani menyediakan sapirodi untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, perikanan, dan peternakan 2. Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha perikanan tangkap untuk meningkatkan skala usahanya 3. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD diharapkan dapat mengatasi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian 4. Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD juga dapat membatasi masuknya produk impor baik legal maupun illegal yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing 5. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPK mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam rangka pemenuhan permodalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rasio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha dalam mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi ketidakstabilan harga sapirodi 3. Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga dapat menambah daya saing produk lokal 4. Mengoptimalkan pencapaian target PAD dengan meningkatkan peran swasta di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan